

# **PENGARUH PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT. REA KALTIM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PULAU PINANG KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Ardy Maroni<sup>1</sup>, Aji Ratna Kusuma<sup>2</sup>, Anwar Alaydrus<sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program CSR PT. REA Kaltim mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa Pulau Pinang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara. Program CSR di bagi menjadi dua indikator yang dioperasikan yaitu Charity dan Community Development. Sedangkan untuk variabel kesejahteraan masyarakat dibagi menjadi 3 indikator yang dioperasikan yaitu Pendidikan, daya beli dan kesehatan. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif, yaitu metode yang diarahkan untuk melihat hubungan antara dua variabel dengan cara memeparkan atau menggambarkan hubungan keduanya. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga di desa Pulau Pinang, dan diperoleh 83 responden dengan menggunakan teknik Rndom Sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode Kuesioner yang diisi oleh responden. Kemudian data yang diperoleh Dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis data menggunakan program SPSS 20 menghasilkan korelasi Product Moment sebesar 0,601. Probabilitas probabilitas Sig. < 0,05, maka H<sub>0</sub> ditolak, berarti terdapat hubungan Program CSR dengan Kesejahteraan Masyarakat. Kesimpulan yangdidapatkan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara program corporate social responsibility PT. REA Kaltim terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Pinang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara dengan persentase sebesar 36,1%.*

**Kata Kunci:** *Program, Corporate Social Responsibility, kesejahteraan, masyarakat*

## **Pendahuluan**

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri telah dikenal sejak awal 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [maroonfive@gmail.com](mailto:maroonfive@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Sudi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Sudi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (*Sustainable Development*). Program CSR tidak hanya merupakan kegiatan kreatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum semata. Program CSR merupakan salah satu kegiatan sosial yang wajib dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sehubungan dengan adanya tuntutan dan kebutuhan akan program CSR yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru yaitu UU No 40 Tahun 2007. Undang-Undang ini disyahkan dalam sidang paripurna DPR. Terdapat dua Undang-undang (UU) yang mempertegas bahwa program CSR merupakan kewajiban bagi Perseroan Terbatas, yakni menegaskan tentang CSR yakni UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 dan UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15,17 dan 34.

Pemikiran tentang CSR kini didasarkan pada kebijakan perusahaan sebagai komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas melalui kerjasama antara para pelaku bisnis dan sumber daya yang ada dalam kehidupan komunitas, Kotler dan Lee (2005). Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan tentang keuntungan perusahaan semata saja (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi keuntungan, sosial dan aspek lingkungan biasa disebut (*Triple bottom line*) sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan. Dimaksudkan agar perusahaan memberikan perhatian kepada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Bagi perusahaan, program CSR dimaksudkan secara tidak langsung dapat memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan dan persepsi positif masyarakat terhadap perusahaan, bagi produktifitas, terutama memperoleh keamanan di lingkungan perusahaan berasal dari masyarakat setempat dan berhubungan dengan aktifitas perusahaan yang sifatnya non materiil tidak terganggu oleh keinginan masyarakat. Hal ini akan turut memacu produktifitas perusahaan untuk menghasilkan sesuatu dengan target perusahaan. Adapun tujuan program CSR dilaksanakan adalah merespon kondisi lingkungan sekitar perusahaan dan melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan bersama dengan masyarakat untuk mencapai masyarakat yang berdaya dan sejahtera.

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur dalam keberhasilan suatu pembangunan dan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ini diperlukan dukungan dari berbagai komponen diantaranya adalah pemerintah, swasta dan bahkan masyarakat itu sendiri. Pihak swasta dalam hal ini adalah perusahaan yang memiliki tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat terutama di lingkungan yang menjadi area perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

PT. REA Kaltim Plantations (REAK) adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit PMA dan pengolahannya yang telah beroperasi sejak tahun 1994 di

Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. REAK telah memiliki luas kebun yang tertanam sekitar 3.200 ha dan memiliki 3 buah PKS (2 PKS kapasitas 80 Ton TBS/Jam dan 1 PKS dengan kapasitas 40 Ton TBS/JAM). Dengan komoditas minyak kelapa sawit, kelompok industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati dan hewani.

Penerapan program CSR terhadap kesejahteraan masyarakat di PT. REA Kaltim (REAK) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit sudah berjalan sejak sebelum adanya UUPT tahun 2007. Sejak awal berdirinya, di tahun 1996 PT. REA Kaltim telah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuat program pemberdayaan masyarakat desa (PPMD) dengan membantu masyarakat dalam membuat kebun kelapa sawit, memberikan penerangan pada desa yang berada di dekat perusahaan ini. Selanjutnya program CSR menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 hingga sekarang program CSR PT. Rea Kaltim memiliki tiga departemen diantaranya community development, PPMD dan konservasi. Dengan demikian pelaksanaan CSR memiliki fokus masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan.

Adapun proses pemberian bantuan, PT. REA Kaltim melakukannya dengan cara melihat kebutuhan masyarakat dan juga dengan berdasarkan apa yang diajukan oleh masyarakat. Kemudian akan dipilih mana yang akan menjadi prioritas program CSR. Untuk jumlah dana yang diberikan tidak ada pembatasan, disesuaikan dengan berapa besar yang dibutuhkan akan dipenuhi oleh perusahaan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. REA Kaltim Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pulau Pinang, Kecamatan Kembang Janggut“. Penulis memilih PT. REA Kaltim Plantation karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan multinasional di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bergerak di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit. Selain itu, perusahaan ini telah beroperasi lama di daerah Kembang Janggut sehingga menarik untuk mengetahui sejauh mana peran PT. REA Kaltim dalam mendukung pemerintah dalam hal peningkatan kesejahteraan.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Teori Pembangunan***

Teori tahap-tahap pertumbuhan dikembangkan oleh W.W. Rostow pada pertengahan tahun limapuluhan dan kemudian disebarluaskan melalui bukunya yang diterbitkan pada tahun 1960 dengan berjudul: *The Stages of Economic Growth: a non-communist manifesto* dalam Subandi (2011). Rostow proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap dan setiap negara berada dalam salah satu dari tahap-tahap pembangunan sebagai berikut:

#### ***Masyarakat Tradisional***

Rostow mengartikan masyarakat tradisional sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas, didasarkan pada teknologi, ilmu pengetahuan dan sikap masyarakat seperti sebelum masa Newton, yaitu masyarakat yang masih menggunakan cara-cara produksi yang relative primitif.

#### *Prasyarat Lepas Landas*

Tahap ini didefinisikan sebagai suatu zaman di mana masyarakat mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*self sustained growth*).

#### *Tahap Lepas Landas*

Tahap lepas landas adalah suatu tahap yang ditandai adanya pembaruan-pembaruan (*inventions*) dan peningkatan penanaman modal. Adanya tingkat penanaman modal yang makin tinggi akan mengakibatkan bertambahnya tingkat pendapatan nasional dan akan melebihi tingkat pertambahan penduduk.

#### *Gerak Menuju Kematangan*

Pada tahap ini didefinisikan sebagai suatu tahap di mana suatu perekonomian memperlihatkan kemampuannya untuk melampaui industri-industri permulaan yang menggerakkan *take-off*-nya dan menyerap hasil-hasil teknologi modern yang paling maju, serta menerapkannya dengan efisien pada sebagian besar dari sumber-sumber yang dimilikinya.

#### *Tahap Konsumsi Masa Tinggi*

Pada tahap konsumsi masa tinggi ini pendapatan riil perkapita meningkat sampai pada suatu titik dimana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan.

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Dalam Gitosaputro dan Rangga (2015) Pembangunan selama ini telah melahirkan sejumlah “pelayanan kepada masyarakat”, sementara itu pembangunan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat akan melahirkan “masyarakat ke dalam layanan”. Memberdayakan masyarakat bukan sekedar memobilisasi masyarakat untuk ambil bagian, melainkan untuk mengejar jaringan kemitraan. Fokus pemberdayaan masyarakat berorientasi pada keluarga. Pemberdayaan ini berisikan:

1. Membangun kapasitas internal keluarga (pengetahuan, keterampilan, sikap, dan sebagainya);
2. Mengubah kepercayaan dan perilaku yang menghambat kemajuan (perkawinan usia dini, pelanggaran disiplin, dan kriminalitas) dan
3. Mmemperkuat nilai-nilai tradisional yang kondusif untuk pembangunan (gotong royong, rasa hormat), dan penyaringan nilai-nilai baru.

Menurut Adjid dalam Gitosaputro dan Rangga (2015), keberdayaan adalah kondisi dinamik yang merefleksikan kemampuan suatu sistem sosial dalam mewujudkan tujuan atau nilai-nilai yang diacunya (diidamkannya). Sehubung

dengan itu maka pemberdayaan beratusaha (program,proses) untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuan secara mandiri.

### ***Teori Stakeholder***

*Stakeholder* merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan Budimanta dkk (2008). Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun memberikan manfaat bagi *stakeholder* lainnya Chariri dan Ghozali (2007). Pemerintah bisa juga dikatakan sebagai *stakeholder* bagi perusahaan sebagai salah satu elemen sistem sosial dalam sebuah negara. Di dalam perusahaan adanya pihak yang diutamakan adalah *stakeholder*. Terdapat sejumlah *stakeholder* yang ada di masyarakat, dengan adanya pengungkapan CSR merupakan cara untuk mengelola hubungan organisasi dengan kelompok *stakeholders* yang berbeda terutama antara perusahaan dengan pemerintah. Tujuan utama dari perusahaan adalah menyeimbangkan konflik antara *stakeholder*. Menurut Gray, Kouhy, dan Adam (1994) dalam Chariri dan Ghozali (2007) mengatakan bahwa “kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan dari *stakeholder* sehingga aktivitas perusahaan adalah mencari dukungan tersebut”, sehingga keberadaan perusahaan tidak dapat terpisahkan dengan stakeholde lainnya.

### ***Teori Legitimasi***

Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, peran perusahaan erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat. Dowling dan Pfeefer (1975) dalam Chariri dan Ghozali (2007) berpendapat bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan.

### ***Corporate Social Responsibility (CSR)***

Menurut Harmoni dan Andriyani (2008) dalam Ilona (2016) substansi keberadaan CSR adalah memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholders* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pembangunan masyarakat sekitarnya. Ada enam kecenderungan utama yang semakin menegaskan arti penting CSR, yaitu:

- a. Meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin.
- b. Posisi negara yang semakin berjarak dengan masyarakatnya
- c. Semakin mengemukanya arti kesinambungan

- d. Semakin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari public, bahkan bersifat anti-perusahaan
- e. Tren kearah transparansi
- f. Harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi.

*Corporate Social Responsibility* sebagai komunikasi organisasi perusahaan yang ditujukan kepada masyarakat merupakan sebuah ide dan gagasan, di mana perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada *single bottem line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tetapi juga diharapkan pada CSR harus berpijak pada *tripel bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya selain ekonomi CSR adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan suatu perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul kepermukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya. Lingkungan sosial yang nyaman akan mendukung berjalannya operasional perusahaan. Itu harus menjadi pertimbangan bagi perusahaan agar dapa beroperasi dengan baik.

### ***Berbagai Bentuk Program CSR***

#### ***Charity (Perbuatan Amal)***

Program *charity* adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan bantuan sukarela kepada kelompok atau masyarakat yang membutuhkan. Biasanya yang mendapatkan kegiatan operasional perusahaan dan sangat susah untuk dibagikan secara merata. Kegiatan ini biasanya dalam bentuk kegiatan kedermawanan, tanpa harus melakukan survey terlebih dahulu ke masyarakat sebagai penerima program. Program *charity* bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang mendesak, ibarat dari program *charity* ini memberikan ikan atau kail.

#### ***Community Development (Pembangunan Masyarakat)***

Konsep *community development* yang berbasis nilai-nilai pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian dalam masyarakat tidak terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pendekatan *community development* semakin banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep *empowerment* dan *sustainable development*. Prinsip-prinsip *good corporate governance*, seperti *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* kemudian menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR.

#### ***Masyarakat***

Masyarakat merupakan objek ataupun subjek dalam pelaksanaan CSR dalam eksistensi perusahaan, masyarakatlah yang terlibat langsung dari pengaruh

keberadaan suatu perusahaan baik positif maupun negatif. “Masyarakat” yang berarti pergaulan hidup kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan aturan tertentu. Masyarakat menurut Koenjaraningrat (2012) adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan system adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terkait oleh suatu rasa identitas bersama.

### ***Teori dan Konsep Kesejahteraan Masyarakat***

Suharto (2008) kesejahteraan social juga termasuk sebagai suatu proses suatu usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga social, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan social dan tunjangan social.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Todaro (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi; *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan ; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya serta nilai-nilai kemanusiaan; dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Secara umum teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarianism*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contactation approach* (Badrudin, 2012). *Classical utilitarianism* menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang yang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif.

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif, menurut Ridwan (2009) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini dijelaskan hubungan antara pengaruh Program CSR PT. Rea Kaltim Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam hal ini penulis merumuskan indikator-indikator yang dipergunakan untuk variabel-variabel yang diteliti, dimana di dalamnya terdapat variabel independen dan variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Program Corporate Social Responsibility (CSR) (Independen variabel atau Variabel X):
  - a. Charity (perbuatan amal)
  - b. Community Development (pembangunan masyarakat)

2. Kesejahteraan Masyarakat (Dependen variabel atau Variabel Y):
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Daya beli

## **Hasil Penelitian**

### **Program Corporate Social Responsibility**

Berdasarkan masing-masing indikator tersebut, peneliti membuat item-item pertanyaan. Berikut ini adalah data hasil jawaban responden terhadap item pertanyaan yang dibuat oleh peneliti: variabel pogram CSR PT. Rea Kaltim, sebanyak 57 responden menjawab C pada item pertama, ini artinya responden mayoritas memilih jawaban tidak pernah mendapatkan bantuan saat terjadi bencana alam dari PT. Rea Kaltim yaitu sebanyak 68,7%. Selanjutnya pada item kedua tentang bantuan PT. Rea Kaltim dalam menunjang prestasi pemuda/ atlet di desa Pulau Pinang, juga didominasi dengan jawaban tidak pernah atau C dari responden. Sebanyak 71,1% responden memilih jawaban tersebut, jelas ini menunjukkan bahwa masih sangat kurangnya perhatian perusahaan terhadap prestasi pemuda/ atlet. Pada item ketiga jawaban B atau kadang-kadang mendominasi jawaban para responden, sebanyak 42,2% atau 35 responden memilih jawaban ini. Artinya, ada bantuan dari PT. Rea Kaltim terhadap kegiatan keagamaan di desa Pulau Pinang. Namun jawaban kadang-kadang disini berarti tidak semua kegiatan keagamaan dibantu oleh perusahaan, melainkan hanya kegiatan-kegiatan besar keagamaan saja. Pada item keempat sebanyak 57,8% atau 48 responden memilih jawaban setuju akan bantuan pertanian/perkebunan dan atau peternakan dari PT. REA Kaltim menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Banyak responden yang mendapatkan bantuan plasma dari perusahaan yang kemudian dikelola sendiri oleh masyarakat, dan juga ada beberapa responden yang pernah mendapatkan bibit hewan ternak yang kemudian memberikan pemasukkan bagi masyarakat. Pada item pertanyaan kelima, peneliti menanyakan bagaimana peran PT. REA Kaltim dalam melakukan pemberdayaan kepada ibu-ibu di desa Pulau Pinang. Sebanyak 36 responden menjawab setuju dan 35 menjawab tidak setuju, ini menunjukkan sebanyak 43,3% setuju dan 42,2% tidak setuju. Dari hasil ini dapat disimpulkan jika pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan masih belum merata, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan peran perusahaan dalam memberikan pemberdayaan kepada perempuan. Selanjutnya pada item keenam tentang apakah ada pembinaan olah raga atau perberdayaan pemuda di desa Pulau Pinang, sebanyak 52 responden atau 62,7% menjawab tidak ada, dan 25 orang menjawab kadang-kadang atau sekitar 30,1% dan 6 responden atau 7,2% menjawab sering. Ini menunjukkan banyak masyarakat yang belum merasakan pembinaan yang dilakukan oleh PT. REA Kaltim, hanya sebagian masyarakat saja yang mersakannya. Berdasarkan fakta di lapangan yang diperoleh peneliti bahwa, terjadi ketimpangan dalam pemberian program CSR yang dilakukan oleh PT. REA

Kaltim. Dimana terdapat beberapa RT di desa Pulau Pinang yang lebih dominan dalam pemberian bantuan. Seperti halnya di RT 08,09 dan 10 yang lokasinya berada di dalam lingkungan perusahaan, sehingga masyarakat disana lebih mendapatkan perhatian dari perusahaan.

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Dapat dilihat bahwa pada item pertanyaan “Apakah dengan berkerja di PT. Rea Kaltim dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?”, sebanyak 5 responden menjawab sangat memenuhi atau sekitar 6,0%, sedangkan jawaban cukup memenuhi sebanyak 53,0% dengan 44 responden yang menjawabnya dan sebanyak 34 atau 41% responden menjawab tidak memenuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang menjawab cukup memenuhi dalam menilai dengan bekerja di PT. Rea Kaltim dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sebanyak 41% menjawab tidak memenuhi. Hal ini dikarenakan banyak responden yang tidak bekerja di PT. Rea Kaltim, lantaran banyak masyarakat yang belum memiliki daya saing dalam bekerja diperusahaan tersebut. Ditambah dengan kebanyakan masyarakat banyak yang bekerja menjadi petani dan juga bekerja ditempat lain. Selanjutnya pada item pertanyaan kedua yaitu pemberian insentif yang diberikan oleh PT. REA Kaltim terhadap pekerja atau pun masyarakat. Sebanyak 16,8% responden menjawab sering, 31,3% menjawab kadang-kadang dan 51,8 menjawab tidak pernah. Sebanyak 14 responden menjawab sering karena diantara mereka mendapatkan insentif dari perusahaan baik yang sebagai pekerja di perusahaan tersebut ataupun sebagai masyarakat dalam hal ini adalah para ketua RT dan lain sebagainya. Sebanyak 26 responden menjawab kadang-kadang yang menandakan mereka hanya sesekali mendapatkan insentif tersebut. Selanjutnya sebanyak 43 responden menjawab tidak pernah, ini banyak dari mereka selain tidak mengetahui juga banyak yang tidak merasakan pemberian insentif dari perusahaan tersebut. Selanjutnya pada item pertanyaan ketiga mengenai apakah terjadi saving atau menabung dalam mereka bekerja di PT. REA Kaltim. Sebanyak 3 responden menjawab tingginya nilai angka dalam menabung dari hasil bekerja diperusahaan. Sedangkan sebanyak 48 menjawab cukup dalam mereka menabung dan 32 responden menjawab rendahnya saving dalam mereka bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masih kurangnya pendapatan masyarakat Pulau Pinang dalam bekerja di perusahaan. Hal ini wajar terjadi karena jika dilihat dari item pertanyaan sebelumnya, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan insentif. Itu artinya masih minimnya angka masyarakat yang menjadi pegawai di PT. REA Kaltim. Pada item pertanyaan keempat responden mayoritas tidak membantu biaya pendidikan dari PT. Rea Kaltim, dengan 46,9% responden memilih jawaban tersebut. Memang banyak masyarakat yang tidak merasakan bantuan dari perusahaan ini, melainkan bantuan banyak datang dari PT. Plasma yang juga berada disekitar desa Pulau Pinang. Selanjutnya inilah yang mempengaruhi jawaban 39 dan 12 responden lainnya, dimana mereka banyak juga yang cukup membantu, karena sesekali ada bantuan yang pernah

didapatkan anaknya. Kemudian responden yang menjawab sangat membantu ini merupakan responden yang berasal dari RT 8,9 dan 10 yang dimana RT ini berada di area perumahan PT. REA Kaltim sehingga mereka merasa terbantu oleh perusahaan. Kemudian dalam pertanyaan kelima peneliti menanyakan apakah anak anda mendapat bantuan fasilitas atau sarana dan prasarana penunjang pendidikan, jawaban responden yang memilih banyak mendapatkan bantuan sebanyak 11 orang atau 13,3%, kemudian sebanyak 5 orang atau 6% menjawab cukup banyak mendapatkan bantuan dan sebanyak 67 responden atau 80,7% menjawab tidak mendapatkan bantuan. Senada dengan ulasab diatas bahwa banyak masyarakat yang tidam mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dikarenakan masyarakat yang tinggal selain di RT 7,9 dan 10 merupan warga desa yang tidak bekerja di perusahaan, selain itu banyak dari mereka mendapatkan bantuan pendidikan ini dari perusahaan lain. Pada item pertanyaan keenam dalam indikator pendidikan ini, peneliti menanyakan apakah program orang tua asuh atau bapak angkat bagi pelajar dilakukan oleh PT. REA Kaltim. Sebanyak 15 responden menjawab ada dengan persentase 18,1%, hal ini dikarenakan ada beberapa orang tua yang anaknya mendapat bimbingan dari guru yang diutus dari PT. REA Kaltim untuk mengajar. Selanjutnya 5 responden menjawab ragu-ragu lantaran tidak mengetahui aka n adanya program ini atau sekitar 6%. Kemudian sebanyak 63 responden menjawab tidak ada program tersebut atau sekitar 75,7%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan dalam program pendidikan PT. REA Kaltim masih sangat kurang. Jawaban respoden dimana pada item ketujuh 23 responden memilih jawaban A yaitu baik atau sebanyak 27,7%, selanjutnya untuk jawaban B dengan keterangan cukup baik sebanyak 33 responden atau sekitar 39,8%, dan jawaban C atau kurang baik sebanyak 27 responden atau 32,5%. Dapat dilihat dari hasil jawaban responden ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dari PT. Rea Kaltim ini cukup baik, dimana masyarkat merasakan manfaat dengan adanya dokter yang membantu disana, selainitu, masyarakat juga mendapatkan bantuan mobil Ambulance apabila harus dirujuk ke rumah sakit lain. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang menjawab kurang baik, hal ini dikarenakan masyarakat yang harus membayar dan kurang mendapatkan pelayanan yang kurang baik. Dalam item pertanyaan kedelapan yaitu tentang adakah tenaga medis dari PT. REA Kaltim dalam memberikan pelayanan, dan hasil jawaban responden dapat dilihat 44 responden atau 53% menjawab ada, 9 atau 10,8 menjawab ragu-ragu dan 30 atau 36,2% menjawab tidak ada. Dapat terlihat banyak masyarakat yang menjawab ada tenaga medis dari PT. REA Kaltim, yang mana tenaga medis ini berada di lingkungan dalam perusahaan saja tidak berada langsung di puskesmas pembantu yang ada di desa Pulau Pinang, dan hanya masyarakat yang pernah berobat kesanna saja pernah mendapatkan pelayanan tersebut. Sedangkan jika masyarakat yang tidak berobat kesana, mereka tidak merasakan adanya tenaga medis dari perusahaan. Begitu pula dengan jawaban ragu-ragu responden tidak mengetahui aka nada atau tidaknya tenaga medis tersebut.

Selanjutnya pada pertanyaan kesembilan yaitu apakah ada pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan petugas kesehatan dari PT. REA Kaltim, sebanyak 15 responden atau 18,1% menjawab sering dan 4 responden atau 4,8% menjawab kadang-kadang, lalu sebanyak 63 atau 75,9% menjawab tidak pernah. Hal ini terjadi karena masyarakat yang menjawab pernah adalah mereka yang berada di RT 8,9 dan 10, memang pada dasarnya ada ketimpangan pemberian fasilitas yang terjadi di desa Pulau Pinang, terbukti dengan banyaknya responden yang menjawab tidak pernah merasakan adanya pemeriksaan kesehatan dari perusahaan yang satu ini.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT. REA Kaltim baik dalam bentuk *charity* atau perbuatan amal maupun *community development* atau pembangunan masyarakat berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 68,7% responden tidak pernah mendapatkan bantuan saat bencana alam terjadi oleh PT. REA Kaltim, dan sebanyak 71,1% juga tidak pernah merasakan bantuan bagi prestasi/pemuda/atlet di desa Pulau Pinang. Namun, sebanyak 42,2% responden menjawab kadang-kadang ada bantuan untuk kegiatan keagamaan di desa mereka oleh PT. REA Kaltim. Kemudian masyarakat sebanyak 57,8 setuju dengan mendapatkan bantuan pertanian/perkebunan/peternakan dari PT. REA Kaltim menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, dan 43,3% setuju bahwa pemberdayaan perempuan membuat ibu-ibu di desa Pulau Pinang menjadi lebih produktif. Namun, jawaban ini selisih sedikit dengan jawaban tidak setuju para responden yaitu mencapai 42,2%. Sedangkan sebanyak 62,7% responden menjawab tidak ada pembinaan olah raga atau pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh PT. REA Kaltim. Dari hasil ini menunjukkan bahwa program CSR PT. REA Kaltim masih belum merata dalam pelaksanaannya di desa Pulau Pinang.
2. Kesejahteraan masyarakat, pada item pertama yaitu 53% responden menjawab dengan bekerja di PT. REA Kaltim cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sebanyak 51,8% menjawab tidak ada insentif yang diberikan oleh PT. REA Kaltim. Begitu pula dengan jumlah responden yang dapat menabung dari hasil mereka bekerja 57,8% menjawab cukup. Dalam segi pendidikan 46,9% responden menjawab PT. REA Kaltim tidak membantu dalam biaya pendidikan anak mereka, dan 80,7% juga menjawab tidak ada mendapatkan bantuan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Begitu pula dengan program orang tua asuh 75,9% responden menjawab tidak ada dilakukan oleh PT. REA Kaltim. Dalam hal kesehatan 39,8 responden merasa cukup baik PT. REA Kaltim dalam keterlibatan memberikan pelayanan kesehatan, dan 53% menjawab adanya tenaga medis dari perusahaan ini dalam pelayanan kesehatan masyarakat Pulau Pinang. Namun sebanyak

77,1% responden tidak ada merasakan pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan oleh PT. REA Kaltim.

### **Saran**

1. Pemerintah Desa Pulau Pinang harus membangun komunikasi kepada PT. REA Kaltim dalam hal pembangunan desa. Hal ini perlu dilakukan agar PT. REA Kaltim juga dapat berkontribusi dalam pembangunan desa agar terciptanya hubungan yang harmonis dan mempercepat kesejahteraan masyarakat desa.
2. Bagi PT. REA Kaltim sebagai stackholder yang mendukung pembangunan daerah maka harus memprioritaskan pembangunan di daerah yang menjadi tanggungjawabnya, mengingat masih banyak masyarakat desa pulau pinang yang tidak merasakan dan juga tidak mengetahui akan program CSR dari PT. REA Kaltim. Selain itu PT. REA Kaltim harus meningkatkan sosialisasi akan program-program CSR yang dimiliki agar masyarakat mengetahui akan program yang dilaksanakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai program CSR hendaknya memperhatikan refrensi dan sumber-sumber terbaru yang sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan agar mampu menyesuaikan variabel-variabel lain yang mengikutinya. Demi penyempurnaan hasil penelitian, perlu diperhatikan pengembangan metode, memperdalam latar belakang masalah dan alat ukur yang digunakan sesuai dengan kondisi dilapangan.

### **Daftar Pustaka**

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Budimanta dkk. 2008. *Corporate Social Responsibility: Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: ICSD.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gitosaputro dan Rangga. 2015. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Situmeang, Illona, 2016. *Corporate Social Responsibility (dipandang dari perspektif komunikasi organisasi)*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Sugiyono, 2012. *Metodologi penelitian kuantitatif , kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suud, Muhammad. 2006. *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

### **Dokumen-dokumen:**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang *Kesejahteraan Sosial*.